

**Memperkuat Inisiatif Konservasi Keragamanhayati Pesisir Laut KBA Perairan Balantak melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Regulasi Perlindungan DPL di Kelurahan Talang Batu dan Memperluas Inisiasi Daerah Perlindungan Laut ke Desa Luok**

**Perkumpulan Relawan Orang dan Alam**



**LAPORAN AKHIR PROYEK**

**September 2018 – September 2019**

## **INFORMASI PROYEK**

Wilayah Pendanaan : PFA 4  
KBA : Perairan Balantak  
Strategic Direction (s) : Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut  
Nomor Laporan : 01  
Periode Waktu : September 2018 – Februari 2019  
Disampaikan Oleh : Mochammad Subarkah  
Tanggal : 24 September 2019

### Hibah Proyek:

(a) dalam USD : : 24,655.68  
(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 325.455.000

Kontribusi Mitra : Alokasi staf, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi Donor (Program) lain (jika ada): -

Periode Proyek : September 2018 – September 2019

Lembaga Pelaksana (Mitra) : Perkumpulan Relawan Orang dan Alam

## II. RINGKASAN

### 1. Kondisi dan Perkembangan proyek secara umum

KBA perairan Balantak memiliki jenis keragamanhayati yang cukup tinggi, terdapat diantaranya Penyu Sisik *Eretmochelys imbricata*, Hiu Pondicherry *Carcharhinus hemiodon*, Hiu Gergaji, *Pristis pristis* dan beberapa jenis terumbu karang, ikan karang dan lamun. Dengan keragamanhayati yang tinggi juga mengalami ancaman yang tinggi pula. Praktek overfishing dan destructive fishing merupakan ancaman utama bagi kelangsungan keragamanhayati di KBA ini.

Untuk mengurangi tingkat ancaman bagi keragamanhayati di KBA perairan Balantak, pada September 2018 hingga September 2019 melalui dukungan pendanaan RIT CEPF Burung Indonesia, Relawan Orang dan Alam (ROA) memfasilitasi penguatan Penetapan zonasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir melalui DPL meningkatkan kapasitas kelompok pengelola DPL Tanjung Saro.

Selain melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi kelompok Tanjung Saro dan pemerintah Kelurahan Talang Batu dan mereplikasi program ke Desa Luok juga dilakukan kegiatan penyadartahuan dan kampanye yang akan mencakup 12 desa yang beririsan dengan KBA perairan Balantak dengan kondisi perairan yang juga rentan mengalami ancaman yang sama.

Aktivitas penyadartahuan dan kampanye dengan target 12 desa yang beririsan dengan KBA Perairan Balantak dilakukan untuk meminimalisir ancaman terutama berasal dari praktek illegal fishing dan destructive fishing. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi kawasan pesisir laut mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat setempat dengan demikian dukungan untuk mewujudkan melalui dukungan regulasi dan penetapan DPL hingga akhir phase dua tercapai.

### 2. Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan

Dalam periode laporan akhir proyek September 2018 hingga September 2019 di dua wilayah yang mendapat intervensi program yakni Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Wilayah Kelurahan Talang Batu sebagai salah satu wilayah intervensi program pada phase pertama hingga phase kedua menunjukkan perubahan baik ditingkat tapak, masyarakat dan spesies yang secara detail dijelaskan dibawah ini

- Pada tingkat tapak capaian terpenting adalah semakin terlindunginya wilayah daerah perlindungan laut kelompok Tanjung Saro yang mendapat dukungan penuh oleh pemerintah Kelurahan Talang Batu yang dibuktikan dengan implementasi dalam bentuk penyadaran pentingnya kebersihan lingkungan dan wilayah pesisir yang dalam kegiatan tersebut pemerintah menyebutnya PINASA yang dilakukan saban setiap jumat.



Figure 1 Tingkat Tapak di Kelurahan Talang Batu dukungan terhadap kebersihan lingkungan dan wilayah pesisir laut diwujudkan dengan program PINASA program aksi bersih Jumat yang melibatkan Pemerintah Kelurahan, Masyarakat dan kelompok pemuda.

- Capaian di tingkat masyarakat sendiri di wilayah Kelurahan Talang Batu untuk mendorong agar pelestarian lingkungan daerah perlindungan laut,

wilayah pesisir dan terumbu karang, Pemerintah Kelurahan Talang Batu meresmikan sekaligus melantik kelompok pemuda pencinta alam yang fokus dalam aktivitas perlindungan dan penyelamatan wilayah pesisir .



Figure 2 Peresmian sekreteriat Kelompok Pencinta Alam Gempita

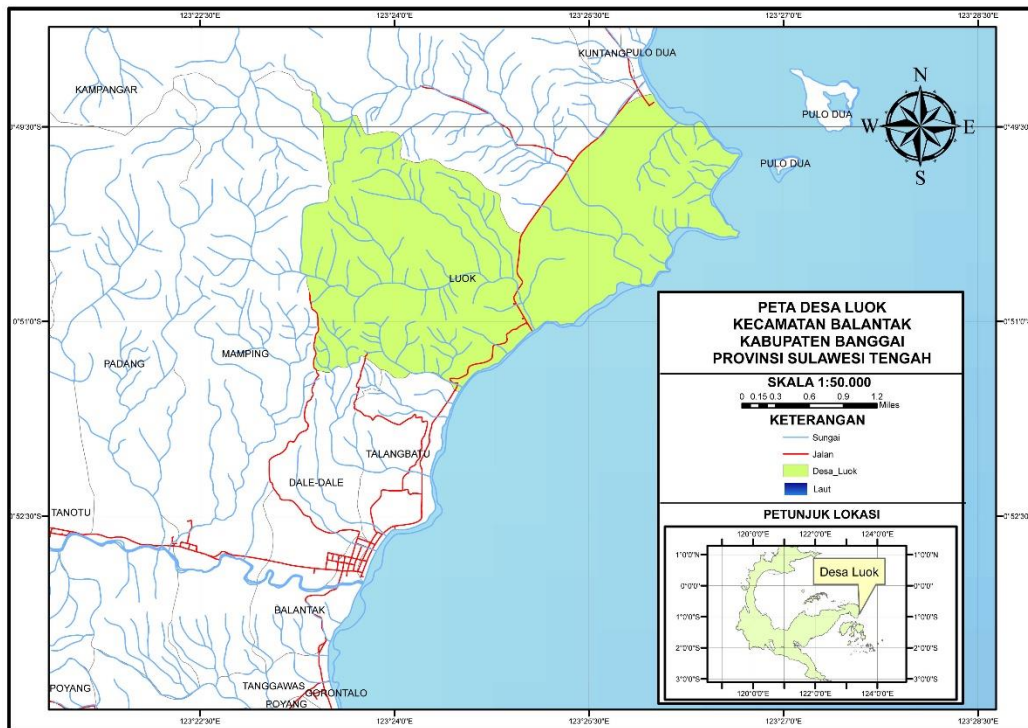
- Capaian penting terkait spesies di wilayah daerah perlindungan laut (DPL) Tanjung Saro sejak phase satu hingga phase kedua menunjukkan perbaikan kondisi wilayah pesisir dan terumbu karang dan spesies semakin. Kelompok Tanjung Saro melakukan monitoring wilayah pesisir dan DPL sebagaimana yang ditunjukkan dalam dokumentasi berupa dan video.



Figure 3 salah satu spesies yang terdokumentasikan dalam monitoring yang dilakukan oleh kelompok DPL Tanjung Saro

- Sedangkan untuk wilayah Desa Luok capaian penting adalah dukungan pemerintah dan masyarakat setempat terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan dimana antara pelaksana program dan penerima manfaat program saling berkontribusi satu sama lainnya.

Salah satu bentuk kerjasama sebagai modal sosial antara kedua belah pihak yakni berupa peta desa Luok yang dikerjakan oleh ROA.



Dalam mengukur dampak atau impact proyek, ROA membagi dalam beberapa item diantaranya berdasarkan Impact Area yang terdiri atas jenis, tapak dan manusia, Model efektif Konservasi Berbasis Komunitas (dan atau kolaboratif) dan Pelembagaan model ke dalam praktek maupun kebijakan yang akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

### 1. Spesies (Jenis)

KBA perairan Balantak memiliki jenis keragamanhayati yang cukup tinggi, terdapat diantaranya Penyu, Hiu dan beberapa jenis terumbu karang, ikan karang dan lamun. Dengan keragamanhayati yang tinggi juga mengalami ancaman yang tinggi pula. Praktek overfishing dan destructive fishing merupakan ancaman utama bagi kelangsungan keragamanhayati di KBA ini.

Intervensi proyek di wilayah Kelurahan Talang Batu sejak tahun 2017 hingga 2019 telah direplikasi oleh Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai telah membantu dalam upaya mengurangi ancaman terhadap jenis satwa yang dilindungi dengan adanya pengendalian terhadap praktek pengeboman maupun penangkapan ikan secara berlebihan di wilayah tersebut.

Jenis Penyu sudah tidak lagi ditangkap dan diperdagangkan karena adanya himbauan untuk perlindungan penyu dan kontrol masyarakat di site proyek terhadap pelaku perburuan yang melakukan perburuan di desanya. Disamping itu pula di site pesisir pantai Desa Luok merupakan nesting ground Gosong Sula oleh kelompok DPL Fajar Indah menjadi wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah yang dilindungi dan upaya perburuan dibasmi dengan membersihkan seluruh jerat yang berada di area nesting ground.

Upaya tersebut tidak serta merta berjalan dengan sendirinya akan tetapi diawali dengan proses penyadartahuan dan kampanye akan pentingnya melindungi keanekaragaman hayati jenis yang berada di Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok. Meningkatnya pengetahuan masyarakat di dua wilayah intervensi proyek tersebut telah mampu mengambil bagian dalam mengontrol perburuan dan giat menganjurkan untuk melindungi penyu, gosong sula dan terumbu karang yang dibuktikan keterlibatan kelompok pencinta alam (KPA) GM Pelita yang memiliki visi dan misi konservasi pesisir dan laut.

Dukungan masyarakat dan kelompok agar jenis dan terumbu karang mendapat perlindungan dan bisa berkelanjutan diwujudkan dengan menetapkan daerah perlindungan laut dengan telah ditetapkan areal perlindungan seluas 4 hektar di Talang Batu dan 74 hektar di Desa Luok melalui surat keputusan Kelurahan Talang Batu terkait pembentukan kelompok Tanjung Saro dan penetapan areal DPL Talang Batu serta keputusan Kepala Desa Luok terkait Kelompok Fajar Indah dan DPL Desa Luok.

Dua kelompok DPL yang terbentuk bersama kelompok Pencinta Alam GM Pelita beserta pemerintah setempat menjadi bagian terpenting dalam mengawal inisiatif perlindungan terumbu karang dan jenis yang dilindungi melalui dukungan atau kontribusi proyek dalam fasilitasi penguatan kapasitas dalam mengawasi serta melakukan monitoring terhadap keberlangsungan keanekaragaman jenis dan terumbu karang di wilayahnya menggunakan tools sederhana dan mudah dipahami terkait Jenis dan terumbu karang.



Figure 4 Salah Satu Jenis yang berada dalam wilayah DPL Tanjung Saro

Kontribusi proyek dalam mendorong penyadartahuan menjadi kunci bagi berhasilnya inisiatif yang telah terbentuk sebagai upaya perlindungan terumbu karang dan jenis melalui fasilitasi diskusi, survei ekologi dan pemetaan wilayah calon DPL serta model pengawasan dan monitoring sederhana yang melibatkan masyarakat secara aktif.

## 2. Tapak

Wilayah intervensi proyek Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai yang berada dalam key biodiversity area perairan balantak masuk kedalam wilayah pesisir desa dalam zona tangkap tradisional . Intervensi dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan dan berbagai indikator untuk mencapai output telah membawa perubahan di tingkat masyarakat dan di level pemerintahan terkait upaya-upaya perlindungan dan pelestarian di wilayah pesisir wilayah Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok secara khusus dan Perairan Balantak secara umum.

Kedua pemerintahan yakni Kelurahan Talang Batu dan Pemerintahan Desa Luok yang mereplikasi program sebelumnya melahirkan surat keputusan kelurahan dan peraturan desa sebagai landasan hukum dalam perlindungan wilayah dan menjamin keberlanjutan inisiatif masyarakat tersebut dengan menetapkan wilayah Daerah perlindungan laut Tanjung Saro ditetapkan di Kelurahan Talang Batu dan Daerah perlindungan laut Fajar Indah Desa Luok.

Wilayah DPL yang telah ditetapkan dan untuk menjaga zona wilayah perlindungan oleh kelompok berdasarkan hasil survei ekologi dan pemetaan wilayah DPL dilindungi dengan pemasangan tanda batas sebagai tanda areal DPL yang ditetapkan untuk tidak dilanggar oleh nelayan dalam melakukan aktivitas memancing atau menambatkan perahu.



Figure 5 Pemasangan Tanda Batas Tapak DPL

Upaya penetapan dan penanda batasan wilayah DPL ditingkat tapak untuk menunjang pelaksanaan atau inisiatif perlindungan dan keberlanjutan DPL yang telah ditetapkan diperkuat dengan menyusun rencana kelola DPL untuk



dijalankan oleh kelompok serta didukung oleh pemerintah dan warga Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok Kecamatan Balantak. Wilayah DPL dan rencana kelola DPL tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok Kecamatan Balantak dan konservasi wilayah melalui proses penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan DPL dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya OPD Dinas Kelautan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut dihasilkan melalui kontribusi implementasi proyek dari beberapa kegiatan yang tepat dan mudah diimplementasikan masyarakat baik dari sisi peningkatan penyadartahuan, peningkatan kapasitas terkait wilayah pesisir dan terumbu karang dan kampanye perlindungan wilayah pesisir dan jenis terancam punah melalui diskusi terfokus, pemutaran film dan penyebaran informasi berupa baliho dan poster.

### 3. People (manusia)

Upaya-upaya yang paling mendasar dalam mendukung perlindungan dan jenis keanekaragaman hayati adalah masyarakat, kesadaran masyarakat yang terbangun dalam proses penyadartahuan telah mendorong terwujudnya tindakan-tindakan yang mendukung proses inisiatif perlindungan wilayah pesisir dan terumbu karang serta jenis keanekaragaman yang berada di wilayah perairan balantak.

Kesadaran masyarakat dan pemerintah kelurahan dan desa diimplementasikan dengan mendukung penetapan DPL dan kelompok pengelola DPL di Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok serta membangun keterlibatan para pihak. Terbentuknya sebuah organisasi kelompok pencinta alam yang membangun visi misi mereka atas dasar terbangunnya kesadaran pentingnya perlindungan keragaman hayati, atau pemanfaatannya secara berkelanjutan telah mendorong pula terlaksananya pengawasan dan monitoring terhadap tindakan-tindakan yang destruktif terhadap keberadaan wilayah pesisir, terumbu karang dan jenis keragamanhayati yang terancam punah di wilayah Talang Batu dan Desa Luok.

Penyadartahuan yang telah meningkat memberikan perubahan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, terumbu karang dan jenis keanekaragaman hayati mendapat dukungan Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa dan kelompok DPL serta kelompok pencinta alam yang kemudian diintegrasikan dalam pola pemikiran keberlanjutan pengelolaan DPL yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama oleh aktor-aktor

penting yang terlibat dan memiliki kepentingan sama dalam pengelolaan wilayah konservasi di perairan balantak.

Aktor-aktor penting dalam pengelolaan wilayah DPL yakni Dua Kelompok Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, sepakat bekerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman konservasi Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan perlindungan wilayah Key Biodiversity Area Perairan Balantak Kabupaten Banggai dalam bingkai pembangunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Sulawesi Tengah.



Figure 6 Prosesi Penandatanganan nota kesepahaman yang terbangun atas dasar kesadaran pentingnya melindungi wilayah pesisir dan jenis keanekaragaman hayati di perairan balantak

Latar belakang kerjasama tersebut didasari wilayah Perairan Balantak memiliki jenis keragamanhayati yang cukup tinggi, terdapat diantaranya Penyu , Hiu, dan beberapa jenis terumbu karang, ikan karang dan lamun dan menjadi lintasan ikan paus serta lumba-lumba. Keragamanhayati yang tinggi itu tak lepas dari ancaman yang tinggi pula, praktik overfishing dan destructive fishing merupakan ancaman utama bagi kelangsungan keragamanhayati di KBA ini.

Untuk mengurangi tingkat ancaman bagi keragamanhayati di KBA perairan Balantak, pada tahun 2017 hingga 2019 melalui dukungan pendanaan RIT CEPF Burung Indonesia, ROA telah memfasilitasi identifikasi, perumusan

dan penetapan DPL di Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok di Kecamatan Balantak.

Peran dan keberadaan dua kelompok DPL tersebut menjadi bagian penting dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan. Peran para pihak juga sangat dibutuhkan untuk secara bersama-sama sehingga ROA memandang perlu memfasilitasi para pihak untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam proses perlindungan maupun pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Peran para pihak itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara kelompok DPL Tanjung Saro Kelurahan Talang Batu dan Kelompok DPL Fajar Indah Desa Luok Kecamatan Balantak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah.

Moh Edward O Yusuf S.Pi, M.Sc, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dibangun selama ini oleh masyarakat dalam membangun kelompok untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan termasuk mengawasi wilayah pesisir dan laut untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di wilayahnya masing-masing.

“Ada keterkaitan dan keterhubungan antara visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dimana dua kelompok ini memiliki program yang berkaitan dengan nilai-nilai konservasi dan kami pun memiliki visi pembangunan berkelanjutan dan misi meningkatkan upaya konservasi, bila dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, laut akan menyediakan kedaulatan pangan, energi dan penyediaan lapangan kerja serta yang terpenting adalah kualitas lingkungan tetap terjaga khususnya ekosistem wilayah pesisir dan laut” urai Edward pada prosesi pertemuan membangun kesepahaman bersama dalam pengelolaan daerah perlindungan laut di wilayah perairan Balantak.

### 3. Perubahan Asumsi dan Resiko serta respon/tindakan lembaga

Dalam pelaksanaan program phase kedua di wilayah Kelurahan Talang Batu dan Luok sekalipun lembaga pelaksana program terdampak oleh bencana Gempa Bumi dan Tsunami serta Likuifaksi pada 28 September 2019 tidak mengubah tujuan dan pencapaian program karena wilayah intervensi tidak mengalami dampak bencana.

Namun demikian, pelaksanaan program sedikit terganggu dalam tata laksana waktu yang telah diagendakan dikarenakan paska gempa, seluruh elemen operasional baik kantor maupun staf masih fokus dalam rangka menangani emergency response baik terhadap kondisi internal maupun eksternal lembaga yang sedikitnya baru pulih kurang lebih dua bulan dari kondisi bencana dan mulai mengkonsolidasikan seluruh sumberdaya untuk kembali melaksanakan program yang telah diagendakan.

Lembaga Perkumpulan Relawan Orang dan Alam mengkonsolidasikan hanya pada tata laksana waktu operasional kegiatan program sehingga secara substansi tujuan dan pencapaian program tetap bisa tanpa mengubahnya.

4. Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir (proyek) Capaian hingga pelaporan akhir proyek ini sebagaimana yang secara ringkas diutarakan sebelumnya baik ditingkat tapak, masyarakat dan spesies berkontribusi dalam pencapaian tujuan proyek yakni berkurangnya ancaman bagi jenis prioritas dan ekosistem pesisir laut di KBA Perairan Balantak melalui kesepakatan penguatan kapasitas pengelolaan DPL di dua desa yang terintegrasi dengan kebijakan/program/kegiatan pemerintah.

Hal itu ditunjukkan dengan indikator nihilnya destruktif fishing dan overfishing di dua wilayah yang menjadi sasaran intervensi program dan pengelolaan DPL dan perlindungan jenis terancam punah secara global di KBA secara khusus di wilayah intervensi program mendapat perhatian pemerintah level desa dan kelurahan serta masyarakat setempat.

### **III. CAPAIAN**

Proyek Memperkuat Inisiatif Konservasi Keragamanhayati Pesisir Laut KBA Perairan Balantak melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Regulasi Perlindungan DPL di Kelurahan Talang Batu dan Memperluas Inisiasi Daerah Perlindungan Laut ke Desa Luok. Proyek berdurasi 12 bulan yang dilaksanakan ROA yang mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama telah menghasilkan beberapa capaian pada periode September 2018 hingga Februari 2019 atau tengah proyek sebagai berikut:

#### **A. Objective**

berkurangnya ancaman bagi jenis prioritas dan ekosistem pesisir laut di KBA Perairan Balantak melalui kesepakatan penguatan kapasitas pengelolaan DPL di dua desa yang terintegrasi dengan kebijakan/program/kegiatan pemerintah.

Objective telah dicapai oleh proyek pada periode tengah proyek dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Destruktif fishing dan overfishing mengalami penurunan 80% di area perairan melalui perluasan zona DPL di dua desa di KBA Perairan Balantak.

2. Perburuan jenis terancam punah secara global yang terdapat di KBA mengalami penurunan 60% di akhir program.
3. Rencana kelola DPL dan perlindungan jenis terancam punah secara global yang terdapat di KBA minimal 40% terintegrasi dan bersinergi.

**Indikator 1** Destruktif fishing dan overfishing mengalami penurunan 80% di area perairan melalui perluasan zona DPL di dua desa di KBA Perairan Balantak. Dipenuhi melalui capaian melalui monitoring di wilayah DPL Tanjung Saro dan proses perencanaan dan persiapan wilayah DPL baru di Desa Luok Kecamatan Balantak.

Kelompok Tanjung Saro berjumlah 7 orang bersama pengelola program melaksanakan kegiatan monitoring bersama untuk memantau kondisi wilayah daerah perlindungan laut dari hasil pantauan terkait kondisi wilayah pesisir menunjukkan kondisi yang baik demikian pula dengan kondisi terumbu karang dan beberapa jenis spesies yang berada dalam wilayah DPL Tanjung Saro di Kelurahan Talang Batu.



Figure 7 Salah satu spesies yang terpantau di wilayah DPL Tanjung Saro

Kelompok Tanjung Saro menyusuri wilayah sepanjang pesisir dan wilayah DPL untuk benar-benar memastikan kondisi atau zona DPL tidak mengalami gangguan baik oleh praktik Destruktif fishing dan overfishing yang dalam pantauan kuranglebih enam bulan tidak terjadi aktifitas yang merusak.

Sementara, untuk wilayah Desa Luok masih proses perencanaan dan penyiapan daerah perlindungan laut dengan terlebih dahulu melakukan penguatan bagi calon masyarakat yang akan terbentuk dalam kelompok perlindungan laut melalui sosialisasi dan pemutaran film sebagai satu pendekatan penyadartahuan akan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati.

Dimana berkat dukungan masyarakat dan pemerintah Desa Luok akhirnya kelompok daerah perlindungan laut terbentuk dengan nama kelompok Fajar Indah.

**Indikator 2** Perburuan jenis terancam punah secara global yang terdapat di KBA mengalami penurunan 60% di akhir program. Dipenuhi melalui capaian melalui pengumpulan informasi ditingkat tapak, masyarakat dan kondisi spesies dilapangan dengan menggunakan form baseline/endline dan form KBA Monitoring di dua wilayah yang menjadi intervensi program.

Pengelola program melakukan monitoring di dua wilayah yakni Desa Luok dan Kelurahan Talang Batu Kecamatan Balantak untuk mengetahui informasi terkait kewilayahan dan kondisi spesies dengan menggunakan form baseline/endline dan form KBA Monitoring sebagai acuan. Metode yang dilakukan dengan pemantauan langsung lapangan dan diskusi non formal dengan anggota masyarakat serta pemerintah setempat untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui perburuan jenis terancam punah.

**Indikator 3** Rencana kelola DPL dan perlindungan jenis terancam punah secara global yang terdapat di KBA minimal 40% terintegrasi dan bersinergi. Indikator ini dalam periode tengah proyek ini belum seluruhnya bisa dicapai mengingat untuk indikator ini masih dalam tahapan proses dan persiapan untuk terintegrasi dan bersinergi dengan para pihak.

## B. Output

Output 1 : Replikasi model perlindungan jenis dan ekosistem di KBA Perairan Balantak melalui identifikasi, perumusan dan penetapan daerah perlindungan laut (DPL) tercapai di desa Luok disertai dengan rumusan pengelolaan. Dengan indikator pertama adalah warga dan pemerintah desa/kelurahan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan zonasi DPL.

Output I dengan indikator pertama tercapai pada periode laporan akhir melalui proses perencanaan dan penyiapan perumusan dan penetapan daerah perlindungan laut (DPL) tercapai di Desa Luok melalui kelompok Fajar Indah disertai dengan rumusan rencana pengelolaan DPL.

Terpenuhi indikator pertama tersebut dan untuk mencapainya telah dilaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan indikator dipenuhi dengan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Diseminasi capaian program tahap pertama ke para pihak di Kabupaten Banggai.

Kegiatan ini sebagai bentuk diseminasi pencapaian program tahap pertama melalui presentase ke para pihak di Kabupaten Banggai yang dirangkaikan dengan presentase rencana program tahap kedua di KBA Perairan Balantak yang dihadiri perwakilan bupati Banggai, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, akdemisi, Staf Camat Balantak, Kepala Desa Luok dan Lurah Talang Batu, Ketua Kelompok Tanjung Saro, Kelompok Pemerhati Lingkungan dengan rincian peserta 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan total partisipan 20 orang, kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Luwuk pada 19 Desember 2018.



## Daftar Publikasi Media

1. <http://sangalu.com/2018/12/19/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak/>
2. <https://beritapalu.com/2018/12/19/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak/>
3. <http://kabar.roa.or.id/2018/12/20/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak/>
4. <https://www.roa.or.id/siaran-pers/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak/>
5. <https://sulteng.antarnews.com/berita/46693/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak>
6. <https://paluexpress.fajar.co.id/30321/roa-desiminasikan-program-kba-perairan-balantak/>



Harian Mercusuar

## 2. Sosialisasi di Tingkat Desa

Sosialisasi Memperkuat Inisiatif Konservasi Keragamanhayati Pesisir Laut KBA Perairan Balantak melalui Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Regulasi Perlindungan DPL di Kelurahan Talang Batu dan Memperluas Inisiatif Daerah Perlindungan Laut ke Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai dilaksanakan pada 3 Januari 2019 di Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai yang dihadiri 30 orang peserta

yang terdiri 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan di Kantor Desa Luok.

Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) melakukan sosialisasi program memperkuat inisiatif masyarakat di Desa Luok yang dihadiri Camat Balantak, Kades, ketua kelompok DPL Tanjung Saro, Komunitas Generasi muda peduli laut dan pantai dan segenap perwakilan masyarakat setempat,

Tahun ini ROA memiliki program penyelamatan ekosistem pesisir dan laut yang dalam kurun satu tahun ini akan melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pencapaian program, sedikitnya ada 15 kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa luok

Item kegiatan diantaranya melakukan survey pengetahuan, survey ekonomi dan sosial serta survey ekologi di wilayah perairan yang menjadi sasaran program. Kegiatan tersebut sepenuhnya melibatkan para pihak atau stakeholder mulai dari tingkat masyarakat, pemerintahan Desa, kecamatan hingga level pemerintahan kabupaten.

Bagi ROA penting untuk melakukan sinergitas program baik yang dikelola oleh masyarakat sipil dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dan level pemerintahan bahkan sektor swasta sehingga kelak bisa membangun ide-ide atau kolaboratif program pembangunan khususnya sektor kemaritiman dan wisata sebagaimana yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai.



Figure 8 Peserta Sosialisasi di Desa Luok masyarakat antusias mendengarkan pemaparan dari ROA

### 3. Survey KAP

Survei pengetahuan dan sikap serta tindakan Survei KAP(baseline/endpoint) dilakukan di Desa Luok dengan melibatkan responden 40 responden atau 30 persen dari total masyarakat di Desa Luok yang berjumlah 154 orang berdasarkan data Kecamatan Balantak dalam angka 2018 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai untuk menganalisa tingkat Knowledge, Atitude dan Practice terkait pentingnya



perlindungan jenis spesies dan keberlangsungan keragamanhayati yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga bulan maret 2019.

Dalam melaksanakan survey dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni Tahap 1 – Desain survei, pengambilan sampel dan data yang dibutuhkan Tahap ini menjelaskan kerangka kerja survei, termasuk muatan dan cakupan pekerjaan survei dan juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis pemangku kepentingan dan masyarakat yang harus disurvei.

Tahap 2 – Perencanaan dan pelatihan tim. Semua anggota tim membutuhkan pelatihan secara lengkap dan rinci sehingga semua anggota tim harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan kegiatan dan makna setiap pertanyaan yang akan ditanyakan.

Pembagian tugas antara anggota melalui persiapan yang matang (merancang pekerjaan survei, melatih tim, dll) dan penjadualan pekerjaan survei sangat penting untuk keberhasilan survey. Persiapan tim survei dan kesepakatan rencana kerja dan kerangka waktu untuk menyelesaikan survei harus ditetapkan lebih dahulu. Desa yang akan disurvei juga harus diberitahu terlebih dahulu sebelumnya dan izin untuk melakukan wawancara harus diperoleh dan dipastikan.

Tahap 3 adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini tim survey melakukan proses wawancara dengan calon responden. Selanjutnya melakukan proses fokus diskusi terbatas yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta perempuan termasuk pemerintah desa dan terakhir adalah mengolah data hasil survey berdasarkan form instrument survey dan pembuatan laporan hasil survey



Figure 9 proses survei KAP di Desa Luok

Hasil Survei KAP menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Luok terkait beberapa pertanyaan yang diajukan kepada 40 responden tentang Padang Lamun, Terumbu Karang, Manfaat dan jenis spesies dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

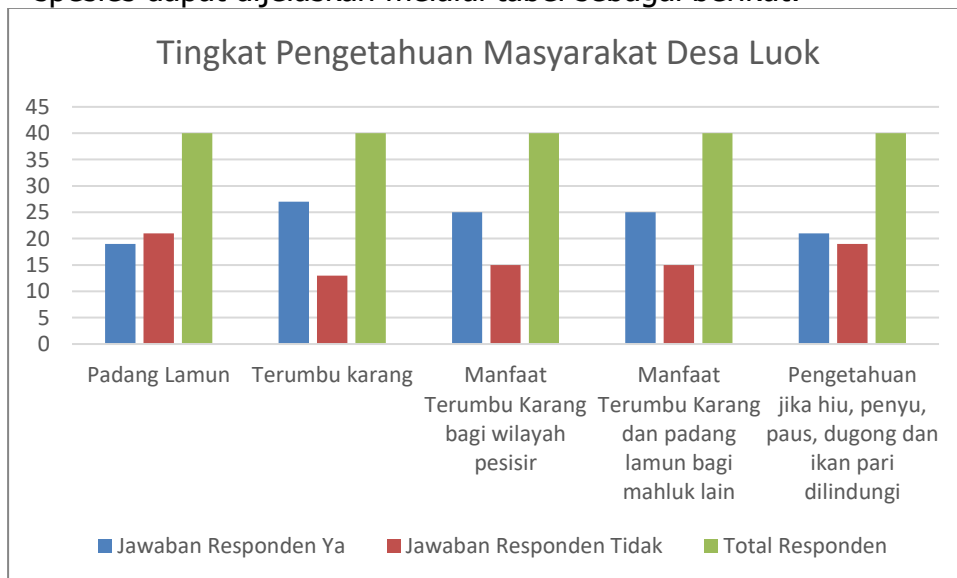


Figure 10 Tabel Pengetahuan Masyarakat Desa Luok

Sedangkan hasil survei terkait sikap masyarakat Desa Luok menunjukkan sikap yang mencerminkan pentingnya menjaga dan mendukung terlindunginya wilayah pesisir, terumbu karang dan keterlibatan semua pihak dalam pelestarian keanekaragaman seperti yang dapat dilihat dibawah tabel berikut:

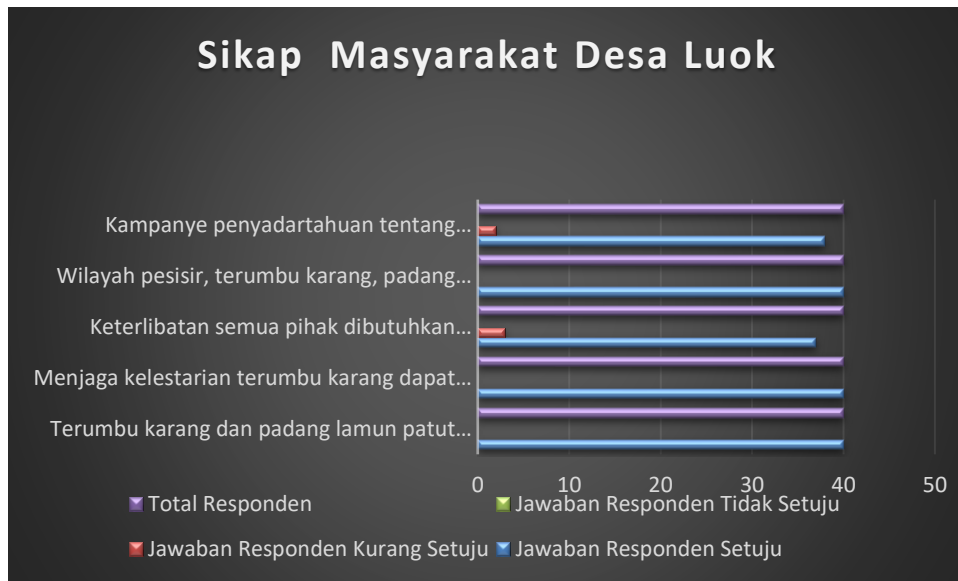
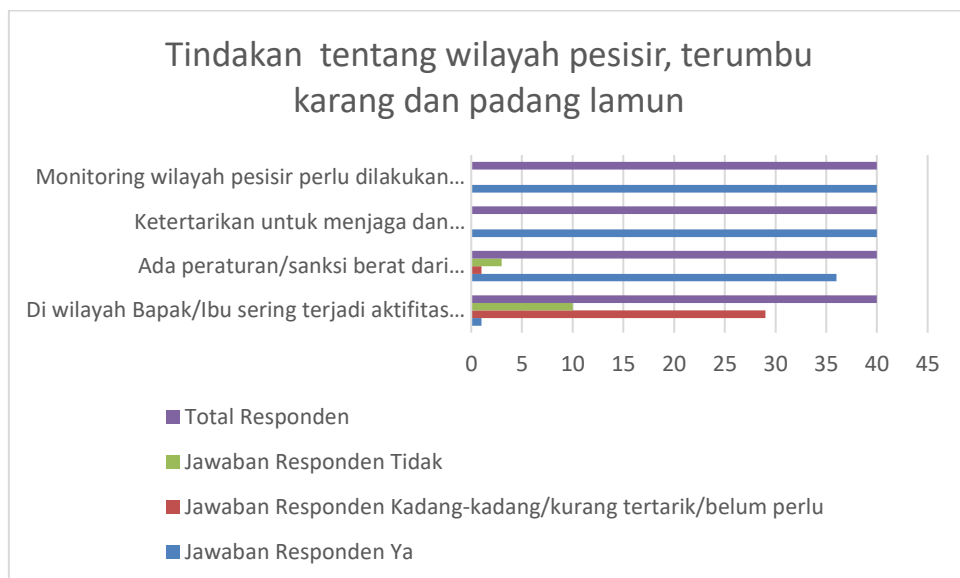


Figure 11 Tabel Sikap Masyarakat Desa Luok

Sedangkan terkait tindakan masyarakat di Desa Luok tentang wilayah pesisir, terumbu karang dan padang lamun menunjukkan tindakan yang positif terkait upaya-upaya pelestarian, perlindungan dan monitoring terhadap wilayah pesisir, terumbu karang dan padang lamun yang merupakan tempat bertumbuhkembangnya spesies. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:



- Serial Kampanye dan Penyadartahuan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Kegiatan serial kampanye dilakukan sebanyak lima kali dalam periode pelaporan tengah program telah dilakukan 5 kali serial kampanye di lima

desa yang beririsan dengan KBA Perairan Balantak yakni Desa Luok, Kelurahan Talang Batu, Desa Tombos, Desa Dondo dan Desa Giwang dengan tingkat partisipasi masing-masing di desa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Date	Desa	Partisipan		Total Partisipan
			Laki-laki	Perempuan	
1	16 Januari 2019	Luok	16	15	31
2	17 Januari 2019	Talang Batu	17	9	26
3	29 April 2019	Tombos	19	10	29
4	30 April 2019	Dondo	17	8	25
5	2 Mei 2019	Giwang	16	8	24
<b>Total Partisipan</b>			<b>85</b>	<b>50</b>	<b>135</b>

Dengan menyasar masyarakat di level desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten melalui metode diskusi, penggunaan alat peraga, pertunjukkan seni, pemutaran film berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati.

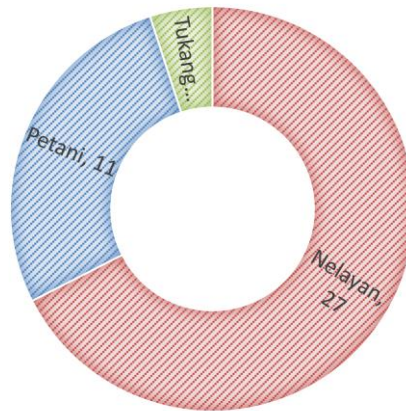
Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati dalam mendukung penghidupan berkelanjutan di wilayah KBA perairan Balantak pada khususnya dan wilayah Kabupaten Banggai pada umumnya.

#### 5. Survei ekologi dan ekonomi

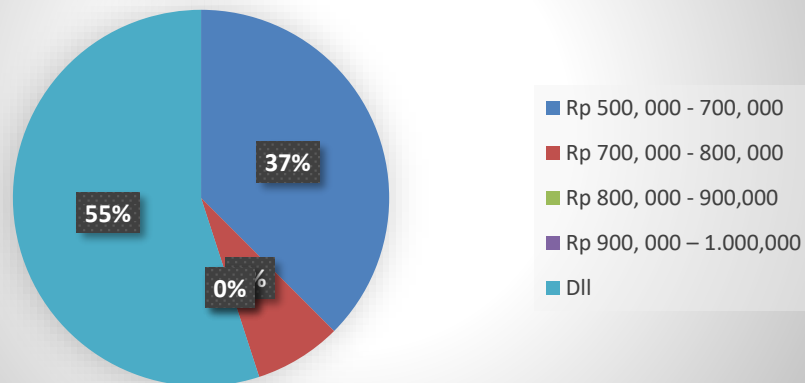
Survei Ekonomi dilaksanakan di Desa Luok dengan melibatkan 40 responden untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendapatan masyarakat di Desa Luok. Survei ini dilakukan mendapatkan informasi sehingga bisa menambah pengetahuan terkait korelasi antara jenis pekerjaan, pendapatan dan situasi yang dapat memengaruhi kondisi pengelolaan wilayah pesisir untuk mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di KBA Perairan Balantak.

### Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Luok

■ Petani ■ Nelayan ■ Tukang/buruh ■ PNS



### Tingkat Pendapatan Responden di Desa Luok



Data yang ditampilkan dalam masing-masing diagram menyebutkan bahwa dari 40 responden yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 27 orang, petani 11 orang dan tukang atau buruh 2 orang dan dari sisi pendapatan dari 40 orang responden menunjukkan masyarakat yang berpendapatan Rp 500,000 - 700,000 terdapat 15 orang atau 37% dari total responden sedangkan mereka yang berpendapatan antara Rp 700,000 - 800,000 hanya 3 orang dari total 40 responden atau 8% dan sebanyak 55% atau 22 orang dari 40 responden tidak bisa menjawab berapa sesungguhnya pendapatan mereka selama sebulan.



Figure 12 proses survei ekonomi yang melibatkan responden di Desa Luok

Kegiatan Survey sebagai salah satu tahapan untuk mendukung beberapa proses yang telah dilaksanakan sebelumnya, dalam tahapan proses survey ekologi terdapat 15 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang tergabung dalam tim survey di wilayah Desa Luok.

Tim survei menghasil data dan informasi tentang ekologi ekosistem pesisir yang terlampir pada laporan teknis survei ekologi. Semua pihak yang terlibat bersama melakukan pembekalan dan persiapan sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai yang di harapkan. Pada proses melakukan survey ekologi peserta harus memerhatikan keadaan cuaca. Cuaca buruk dapat menghambat pelaksanaan survey baik dari segi kejernihan air laut, angin, hujan serta arus yang tidak seimbang akan mempengaruhi hasil survey.

Desa Luok sendiri memiliki beberapa perubahan cuaca, diantaranya musim penghujan, Badai, Gelombang laut. Pelaksanaan survey dilakukan dalam dua tahapan diantaranya pagi dan sore karena keterbatasan jarak pandang di dalam air serta arus dan gelombang yang begitu kencang.

### **Ekosistem Pesisir Desa Luok**

#### **Terumbu Karang**

Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang

belakang dalam Filum Cnidaria yang sangat sederhana, berbentuk tabung dan memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Karang (coral) mencakup karang dari Ordo Scleractinia dan Sub kelas Octocorallia (kelas Anthozoa) maupun kelas Hydrozoa (Veron, 2000).

Terumbu karang merupakan ekosistem yang unik dan spesifik karena pada umumnya hanya terdapat di perairan tropis serta sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan perairan, terutama suhu, salinitas, sedimentasi dan eutrofikasi, serta memerlukan kualitas perairan alami (Veron, 1995 dan Wallace, 1998).

Ekosistem terumbu karang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan laut seperti cahaya, gelombang, arus, salinitas suhu, sedimentasi, ketersediaan makanan (nutrien), pasang surut, dan tipe substrat.

Faktor fisik dan lingkungan berpengaruh terhadap keberadaan karang dan keanekaragaman jenis. Kompleksitas dan keanekaragaman karang akan tetap terjaga jika kesetimbangan ekologis dapat tercapai di antara karang dan biota yang berasosiasi dengannya. Asosiasi ini terjadi, misalnya, dengan Echinodermata, ikan karang, lamun, alga, Acanthaster plancii dan biota lainnya.

Karang mempunyai strategi tersendiri untuk dapat bertahan hidup, seperti bentuk pertumbuhan dan kemampuan bereproduksi. Masing-masing karang juga memberikan respons yang berbeda untuk bertahan terhadap penyakit, predator, serta kompetisi dalam perebutan ruang.

Hasil pengukuran dengan menggunakan metode LIT di Pesisir pantai Desa Luok yaitu untuk kisaran rata-rata presentase tutupan karang hidup adalah sekitar 30-60 persen, karang lunak sebesar 30-50 persen, dan karang mati mati sekitar 20-45 persen

Output I dengan Indikator kedua yakni adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah Desa Luok untuk menetapkan DPL dengan luas minimal 20 hektar yang batas-batasnya mudah dikenali dan disepakati secara partisipatif.

Terpenuhi indikator kedua tersebut dan untuk mencapainya telah dilaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan indikator dipenuhi dengan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

#### 6. Pelatihan Pemetaan dan Pemetaan Partisipatif

Pelatihan pemetaan dan pemetaan partisipatif merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat dan pemerintah Desa Luok sebanyak 15 orang untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pemetaan dan terlibat langsung dalam proses pemetaan sehingga dapat

mengetahui titik kordinat calon wilayah DPL dan dikelola oleh kelompok DPL yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 sampai 07 bulan Juli 2019 selama 7 hari proses.

Untuk mempermudah proses pelatihan pemetaan dan mengingat Pemetaan Partisipatif adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri maka ROA menyiapkan bahan atau materi mengenai pentingnya pemetaan partisipatif yang secara garis besar memuat tentang tahapan kegiatan diantaranya :

1. Memahami Pemetaan Partisipatif
2. Kesepakatan-kesepakatan desa yang penting
3. Perencanaan kegiatan pemetaan
4. Pelatihan tehnik pemetaan
5. Memeriksa peta pengesahan
6. Rencana tindaklanjut

Dalam proses pembuatan atau penyusunan peta masyarakat mendiskusikan dalam sebuah pertemuan untuk menyusun drat peta yang telah melalui proses pelatihan teknik pemetaan dan melakukan pemetaan yang dilakukan dengan mengecek informasi yang diperoleh selama pemetaan.

Diskusi tersebut telah menampilkan gambaran tentang peta yang pembuatannya difasilitasi oleh lembaga pengelola program namun tetap masyarakat yang akan menjadi bagian finalisasi dratf peta untuk kemudian disahkan melalui pertemuan para pihak (masyarakat dan pemerintah desa)



Pelatihan Pemetaan dan pemetaan partisipatif



#### 7. Penyusunan Peta DPL dan Pemasangan Tanda Batas

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Daerah Perlindungan Laut Fajar Indah Desa Luok Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai telah melalui proses pelatihan pemetaan partisipatif yang dilanjutkan dengan melakukan pemetaan di lapangan. Pemetaan lapangan untuk wilayah daerah perlindungan laut tersebut telah menghasilkan peta wilayah daerah perlindungan laut.

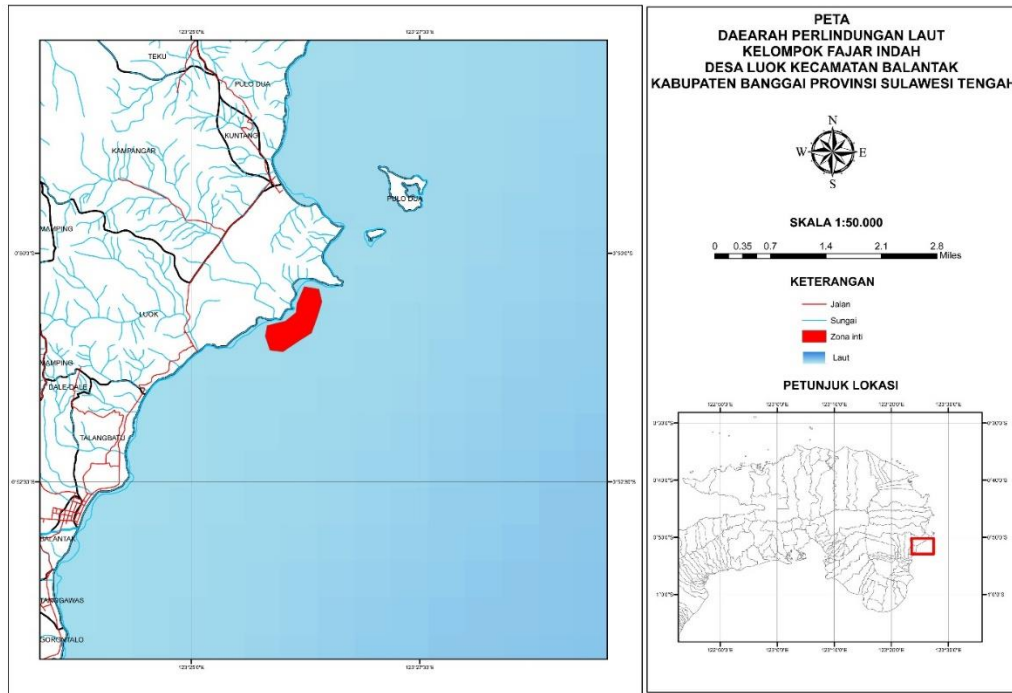
Sebagai rencana tindak lanjut hasil pemetaan tersebut adalah melakukan pendiskusian dengan melibatkan pelaksana program, pemerintah desa dan kelompok daerah perlindungan laut untuk menyusun hasil pemetaan yang masih dalam bentuk draft menjadi sebuah keputusan bersama dalam rangka menyepakati hasil pemetaan tersebut menjadi sebuah peta wilayah daerah perlindungan di Desa Luok pada 10 Juli 2019.

Sebelum membuat/menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumberdaya Wilayah Pesisir, melalui peta yang dihasilkan perlu diketahui pandangan, arah, cita-cita dan harapan masyarakat Desa Luok tentang desanya sendiri melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis-masyarakat.

Dalam workshop ditekankan kembali bahawa tujuan pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di sekitar DPL sekaligus melindungi keanekaragaman makhluk hidup dan terumbu karang di dalam DPL.

Upaya ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjaga dan mengelola DPL tersebut. Ekosistem terumbu karang di Desa Luok perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan perlindungan pantai.

Dalam workshop ditemukan pula beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya ancaman kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak seperti racun dan bom yang dilakukan oleh masyarakat dari luar desa, adanya penangkapan jenis hewan yang dilindungi seperti penyu, dan kurangnya penegakan hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan. Dengan adanya peta yang dihasilkan dan disusun bersama merupakan bagian penting untuk masyarakat Luok mengetahui wilayah Daerah Perlindungan Laut yang disepakati bersama untuk dijaga, dilindungi dan untuk kepentingan bersama dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang ada di desa.



8. Pengesahan Perdes Pengelolaan DPL Desa Luok dan Talang Batu serta Sinkronisasi Pengelolaan DPL dengan RPJMdes.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang cepat telah mendorong wilayah pesisir dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia baik secara persial maupun sektoral tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya. Dengan tingkat laju pembangunan yang sedemikian tinggi di wilayah pesisir, yang disertai dengan kecenderungan penduduk yang padat, telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan pesisir seperti : kerusakan sistem mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuari, serta meningkatnya intensitas pencemaran dari darat ke laut, dan terjadinya tangkap ikan lebih. Semuanya ini telah menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan pesisir secara dratis.

Perubahan lainnya yang terjadi di wilayah pesisir adalah adanya ketidak jelasan pengelolaan, kepemilikan dan penguasaan terhadap sumberdaya

pesisir yang disebabkan oleh tidak dihargainya lagi hak-hak masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Peraturan Perundangan yang ada masih bersifat sektoral dan berorientasi pada eksploitasi sumberdaya, dan belum terkoordinasinya pembangunan di wilayah pesisir.

Semuanya ini telah mendorong timbulnya konflik kewenangan dan kepentingan antara instansi dan tingkatan pemerintah, antar sektor pembangunan : timbulnya konflik antar peraturan perundang-undangan, konflik peraturan dengan keberadaan hukum adat setempat atau masih terdapatnya kekosongan hukum dalam peraturan.

Ini kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan masyarakat di wilayah pesisir selalu dalam kemiskinan dan termarginalisasi. Pada 13 – 14 Juli 2019 sebanyak 15 Orang diantaranya 14 Orang Laki-Laki dan 1 Orang Perempuan berkumpul untuk membahas Peraturan Desa terkait kelompok DPL dan pengelolaan DPL di Desa Luok yang diawali dengan diskusi-diskusi terfokus tentang inisiasi pembuatan perdes sekaligus membahas draf perdes.



**Output II** Penetapan dan Rencana Kelola DPL di Talang Batu dan Luok di Implementasikan oleh Kelompok DPL melalui penguatan kapasitas mobilisasi sumberdaya kelembagaan bagi kelompok DPL dengan tiga indikator yakni indikator pertama satu kelompok DPL terbentuk di Desa Luok disertai dengan kesepakatan rencana kelola DPL. Indikator kedua Kelompok DPL yang telah disepakati di Desa Luok dan Talang Batu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan rencana kelola. Indikator ketiga Rencana Kelola DPL terdiseminasi ke seluruh masyarakat di dua desa dan pemerintah Kabupaten/Provinsi.

Indikator I output II dicapai melalui beberapa aktivitas sebagai berikut :

2.1 Serial FGD kesepahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan DPL dan Perlindungan KBA secara partisipatif.

Serial Fokus Grup Diskusi merupakan metode yang digunakan untuk membangun kesepahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Perlindungan KBA secara partisipatif.

Kegiatan dilaksanakan 3 kali di Desa Luok dan 3 kali di Kelurahan Talang Batu dengan jumlah peserta FGD secara total dapat dilihat dalam tabel berikut:

Date	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
10 Januari 2019	Luok	5	2	7
13 Januari 2019	Luok	5	2	7
14 Januari 2019	Luok	5	2	7
19 Januari 2019	Talang Batu	5	2	7
20 Januari	Talang Batu	5	2	7
25 Januari	Talang Batu	5	2	7
<b>Total</b>		<b>30</b>	<b>12</b>	<b>42</b>

Masukan dari hasil serial FGD dengan tema Perlindungan dan pengelolaan DPL Berbasis Masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat di Desa dan Kelurahan Luok mengharapkan DPL sebagai salah satu upaya yang efektif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir, yaitu dengan melindungi habitat penting di wilayah pesisir, khususnya ekosistem terumbu karang dapat terealisasi dan bisa berjalan.
2. Mengharapkan DPL sebagai wilayah penting bagi masyarakat setempat sebagai salah satu cara meningkatkan produksi perikanan (terutama ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang),
3. Dengan adanya DPL masyarakat dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui kegiatan penyelaman wisata bahari, dan pemberdayaan pada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya mereka.

FGD dengan tema Peluang dan Tantangan Perlindungan serta Pengelolaan DPL berbasis masyarakat menghasilkan beberapa masukan diantaranya adalah :

1. Masalah lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir seperti; pencemaran lingkungan, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, pengambilan terumbu karang.
2. Berbagai bentuk degradasi habitat pesisir memerlukan tindakan-tindakan yang pemulihan dan pencegahan agar tidak berdampak pada menurunnya produksi perikanan secara langsung atau tidak langsung serta menjaga kelangsungan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

FGD dengan tema ketiga adalah Pengelolaan dan Perlindungan DPL Bagian Pembangunan Desa Berwawasan Konservasi beberapa masukan diantaranya adalah lebih pada bagaimana konsep dan implementasinya sebagaimana yang menjadi catatan diskusi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pesisir tingkat pusat maupun lokal harus mencakup mekanisme yang menjamin adanya keikutsertaan masyarakat secara tepat dan efektif dalam pengambilan keputusan pengelolaan pesisir, sehingga kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dapat tercapai secara efektif.
2. Sebagai suatu bagian dari langkah-langkah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut, pengembangan dan pengelolaan DPL sebaiknya disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan ramah lingkungan dengan "konsep pemberdayaan masyarakat".
3. Keterlibatan aktif masyarakat secara luas merupakan inti penting dalam sistem pengelolaan dalam sumber daya laut. Untuk itu, masyarakat yang kehidupannya tergantung dengan sumber daya ini perlu diberdayakan baik pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

## 2.2 Workshop penguatan kapasitas kelompok DPL dalam upaya konservasi keragamanhayati dan peningkatan penghidupan secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Workshop dilaksanakan selama 3 hari dimulai pada 19 hingga 21 Juli 2019 di Balai Pertemuan Desa Luok Kecamatan Balantak melibatkan 15 orang peserta dari perwakilan kelompok DPL dari Desa Luok dan Talang Batu yang membahas konservasi keragamanhayati dan peningkatan penghidupan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam workshop ini adalah dengan melakukan proses penggalian dan berbagi diskusi dan simulasi yang memfokuskan pada keterlibatan aktif peserta sehingga dapat terumuskan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan.



workshop meningkatkan kapasitas pengelola DPL dalam mengoperasikan DPL sebagai organisasi/kelompok yang memiliki visi dan misi dalam menjaga dan melindungi KBA Perairan Balantak untuk penghidupan berkelanjutan.

Workshop pengelola kelompok pengelola DPL bisa memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan kapasitas pengelolaan kelompok yang mengetahui kelemahan, tantangan, peluang dan kekuatannya akan memudahkan pengelola untuk membuat sebuah perencanaan dan strategi yang akan ditempuh dalam menjalankan roda kelompok DPL.



Pada kesempatan workshop memang masih banyak yang perlu dibenahi utamanya dalam kelembagaan dan sumberdaya manusia mengingat khusus penguatan kelembagaan masih sangat minim demikian juga sdm akan tetapi hal itu menjadi tantangan bersama yang secara bersama-sama juga perlu dicari jalan keluar agar bisa mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada saat sekarang.

Workshop menghasilkan catatan penting diantaranya memperbaiki kembali kelembagaan yang sudah ada dan yang baru akan menyusun visi misi lembaga dan program serta kegiatannya.

#### **Publikasi Media**

<https://sulteng.antaranews.com/berita/71160/roa-sulteng-tingkatkan-kapasitas-kelompok-perlindungan-laut-banggai>

<https://palu.tribunnews.com/2019/08/04/upaya-roa-tingkatkan-kapasitas-kelembagaan-kelompok-dpl-di-kabupaten-banggai>

<https://www.kabarselebes.id/2019/08/09-roa-tingkatkan-kapasitas-kelembagaan-kelompok-dpl/>

<https://beritapalu.com/2019/08/04/roa-tingkatkan-kapasitas-kelembagaan-kelompok-dpl/>

<https://kabaroa.com/1377/roa-tingkatkan-kapasitas-kelembagaan-kelompok-dpl/>

### 2.3 Penyusun rencana DPL secara partisipatif



Fasilitasi ini dilakukan di Desa Luok untuk mendampingi kelompok dalam penyusunan rencana kelola DPL yang melibatkan 15 orang pengurus DPL selama 3 hari pada bulan Juli 2019 termasuk memfasilitasi review rencana kelola DPL Kelurahan Talang Batu yang melibatkan 15 orang pengurus DPL.

Kegiatan ini tidak berdiri sendiri karena merupakan rangkaian kegiatan tindaklanjut dari kegiatan penguatan kapasitas kelompok DPL yang dilakukan sebelumnya dalam rangka penguatan kelembagaan DPL dan menyusun rencana-rencana program serta kegiatan.

Dalam proses, dua kelompok DPL telah menuangkan beragam pemikiran, ide termasuk gagasan terkait penyusunan rencana kelola dan bagaimana untuk melakukan implementasi dan siapa saja yang akan terlibat ataupun mendukung program-program yang disusun oleh kedua kelompok DPL yakni kelompok DPL Tanjung Saro dan Kelompok DPL Fajar Indah.

Dalam proses curah pendapat anggota dari DPL yang sudah lama terbentuk dan cukup lama bergabung tetapi tidak menyadari bahwa organisasi mempunyai banyak sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya yang dimiliki antara lain Sumberdaya Manusia (SDM), dan memang tidak dipungkiri perlengkapan minim, dana tidak ada, data, pengetahuan, program kerja, dan lain-lain yang kemudian organisasi tetap saja merasa bahwa mencari dana sulit akhirnya program tidak bisa berjalan.

Hal-hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang mesti dipikirkan solusi terbaik untuk mendukung operasional kelembagaan yang sudah terbentuk dan tentunya komitmen yang terbangun adalah menyusun rencana pengelolaan program yang tepat dan menjadi kebutuhan.

Fasilitasi ini menghasilkan Dokumen rencana kelola DPL Luok dan dokumen review rencana kelola DPL Talang Batu

#### 2.4 Workshop penyusunan regulasi dan integrasi program pembangunan tingkat desa/kelurahan dalam pengelolaan DPL dan rencana kelola.



#### 2.5 Uji praktek rencana kelola dan monitoring DPL secara Partisipatif Uji praktek dan monitoring rencana kelola DPL dilaksanakan satu kali pada 12 hingga 14 Agustus 2019 di Desa Luok dan Kelurahan Talang Batu melibatkan pengurus DPL, masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari dimana hari pertama diskusi, hari kedua aplikasi lapang dan hari ketiga diskusi hasil lapang dan laporan monitoring bersama.





Tujuan dari kegiatan uji praktek rencana kelola dan monitoring DPL secara partisipatif adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak untuk secara kolaboratif melalui uji implementasi program dalam bentuk kegiatan dari kelompok DPL semisal untuk menguji kemampuan pengelola dalam penguasaan wilayah DPL terhadap kondisi ekosistem pesisir laut(terumbu, lamun dan biota laut).



Keterlibatan para pihak dapat membahas hasil secara bersama baik dalam memberikan masukan dan solusi serta rekomendasi dengan menggunakan tools sederhana ataupun tools yang relevan untuk mengukur kinerja pengelolaan sehingga dengan demikian ada upaya-upaya yang bisa berjalan bersama dan saling memberikan dukungan pengelolaan DPL.



Fasilitasi ini menghasilkan Laporan uji praktek dan rekomendasi rencana kelola dan monitoring DPL dan Tools monitoring sederhana

**Output III** Sinergi dan integrasi pengelolaan DPL di tingkat desa dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/provinsi dalam membangun keterhubungan RZWP3K dan KKP. Output III dengan tiga indikator yakni pertama Pengarusutamaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui DPL terintegrasi dengan kebijakan pembangunan desa/kelurahan. Kedua Perlindungan dan Pengelolaan DPL bersinergi dengan KKP/RZWP3K dan program/kegiatan SKPD kabupaten. Ketiga kesepahaman dan kerjasama parapihak (Pengurus DPL, Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi) disetujui dan disahkan.

Indikator ouput III pada tengah periode ini belum dapat dicapai melalui aktivitas sebagai berikut :

3.1 Konsultasi Publik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/provinsi tentang rencana kelola DPL.

KBA perairan Balantak memiliki jenis keragamanhayati yang cukup tinggi, terdapat diantaranya Penyu Sisik *Eretmochelys imbricata*, Hiu Pondicherry *Carcharhinus hemiodon*, Hiu Gergaji, *Pristis pristis* dan beberapa jenis terumbu karang, ikan karang dan lamun.

Dengan keragamanhayati yang tinggi juga mengalami ancaman yang tinggi pula. Praktik overfishing dan destructive fishing merupakan ancaman utama bagi kelangsungan keragamanhayati di KBA ini. Untuk mengurangi tingkat ancaman bagi keragamanhayati di KBA perairan Balantak, pada tahun 2017 melalui dukungan pendanaan RIT CEPF Burung Indonesia, Relawan Orang dan Alam (ROA) telah memfasilitasi identifikasi, perumusan dan penetapan DPL di Kelurahan Talang Batu.



Kesepakatan penetapan DPL oleh warga dan pemerintah Kelurahan Talang Batu menjadi salah satu solusi tepat dalam mengurangi ancaman kerusakan pesisir laut di KBA perairan Balantak. Dengan total luasan 15 hektar yang terdiri dari 4 hektar zona inti dan 11 hektar duperuntukkan sebagai zona pemanfaatan dan rehabilitasi. Skema perlindungan pesisir laut melalui DPL ini berhasil mengurangi laju ancaman dan kerusakan di KBA perairan Balantak.

Penetapan zonasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir melalui DPL juga telah dilembagakan melalui kesepakatan pembentukan kelompok pengelola DPL Tanjung Saro. Kelompok DPL ini dibentuk secara partisipatif oleh warga kelurahan untuk mengawal kesepakatan DPL dan menjalankan program kegiatan DPL.

Inisiatif penetapan dan penyepakatan DPL tercapai berkat dukungan masyarakat dan pemerintah kelurahan dan Kabupaten Banggai. Lahirnya dukungan dan partisipasi para pihak didukung oleh

peningkatan pengetahuan dan kesadaran warga tentang pentingnya perlindungan keragamanhayati di wilayah pesisir.

Disamping kesepakatan dan penetapan zonasi Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang memberikan kepastian ruang kelola dan ruang perlindungan serta inisiatif konservasi pesisir laut, DPL juga memberikan dampak pada peningkatan kesadaran warga terhadap berbagai jenis penting yang ada di kelurahan Talang Batu sebagai bagian dari KBA perairan Balantak.

Keberhasilan program pada periode 2017 dengan capaian yang telah disampaikan di atas, menjadi alasan utama skema dan pendekatan yang dinilai berhasil untuk diperkuat di kelurahan Talang Batu dan diperluas ke desa Luok dengan dibentuknya Kelompok DPL Fajar Indah.



Konsultasi publik untuk mendapat dukungan sebagai bagian rencana aksi pemerintah daerah dan provinsi tentang upaya Perlindungan Key Biodiversity Area Perairan Balantak dalam Bingkai Pembangunan RZWP3K Sulawesi Tengah yang diantaranya untuk

1. Mengurangi ancaman bagi jenis prioritas dan ekosistem pesisir laut di KBA perairan Balantak melalui kesepakatan dan penguatan kapasitas pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL)) di dua desa yang terintegrasi dan bersinergi dengan kebijakan/program/kegiatan Pemerintah.

Hasil atau output yang dicapai dalam Konsultasi publik harapannya dapat membangun sebuah kerjabersama dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Perlindungan Key Biodiversity Area Perairan Balantak dalam Bingkai Pembangunan RZWP3K Sulawesi Tengah adalah untuk membangun Sinergi dan integrasi pengelolaan DPL di

tingkat desa dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten/provinsi dalam membangun keterhubungan RZWP3K di Sulawesi Tengah.

Fasilitasi ini menghasilkan Program kerja DPL Tanjung Saro dan Fajar Indah disinkronkan dengan program kerja DKP Sulteng

3.2 Serial workshop integrasi pengelolaan DPL ditingkat tapak dengan program dan kebijakan pemerintah kabupaten/provinsi.

Tgl 30 Agustus 2019 yang melibatkan 22 Orang partisipan yang terdiri Laki-laki 16 Orang dan perempuan 6 Orang mengikuti workshop integrasi pengelolaan DPL ditingkat tapak dengan program kebijakan pemerintah provinsi melalui DKP Sulteng dimana pada kesempatan itu kepala dinas melalui perwakilan kepala bidang pengelolaan tata ruang wilayah laut pada kegiatan Sinergi dan integrasi pengelolaan daerah perlindungan laut dalam mewujudkan implementasi RZWP-3-k Sulawesi Tengah.



Figure 13 Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Sulteng Moh Edward

Dalam ingatan kita peristiwa bencana di Sulawesi Tengah hampir setahun. Oleh karena itu perhatian kita pada lingkungan pesisir dan laut menjadi penting untuk selalu kita lakukan pada kawasan-kawasan tersebut.

Selain itu juga ekosistem pesisir dan laut dapat menjadi tameng dalam menjaga kita dari perubahan iklim saat ini yang sangat drastis perubahannya dalam beberapa bulan ini terjadi cuaca ekstrem suhu yang sangat panas akibatnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebagai konsekuensinya, beberapa hal yang harus kita sikapi, antara lain menjaga kelestarian lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. terkait hal tersebut, maka saya mengatakan bahwa laut adalah jawabannya. bila dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, laut akan menyediakan kedaulatan pangan, energi, dan penyediaan lapangan kerja serta yang terpenting adalah kualitas lingkungan tetap terjaga khususnya ekosistem wilayah pesisir dan laut.

Sesuai target kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia yaitu 20 juta pada tahun 2020 maka pemerintah provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk andil dalam pencapaian target tersebut

Oleh karena itu dalam mendukung hal tersebut pemerintah Sulawesi Tengah telah mempunyai Perda No. 10 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Merupakan Instrumen Penting Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang didalamnya sudah dialokasikan kawasan konservasi sesuai kewenangan provinsi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Untuk mendukung daerah-daerah perlindungan laut di Sulawesi Tengah atau yang menurut undang-undang disebut kawasan konservasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil telah menetapkan 4 kawasan konservasi yaitu :

1. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (kkp3k) dohoto yang meliputi : Kab. Donggala, Kab. Buol dan Kab. Tolitoli
2. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (kkp3k) tomini yang meliputi : Kab. Parigi Moutong, Kab. Poso dan sebagian Kab. Banggai.
3. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (kkp3k) morowali yang meliputi : Kab. Morowali dan Kab. Morowali Utara.
4. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (kkp3k) banggai dalaka yang meliputi : Kab. Banggai, Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Banggai Laut.

Dengan total luas kawasan konservasi 1.338.291,83 ha, 4 (empat) kawasan konservasi yang telah dicadangkan tersebut telah menyelesaikan rencana pengelolaan dan zonasi (**rpz**) kawasan konservasi yang pada saat ini menunggu pengesahan oleh menteri kelautan dan perikanan.

Implementasinya pemerintah Sulawesi Tengah dalam mencapai indikator kinerja melalui dinas kelautan dan perikanan setiap tahunnya melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut khususnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove karena seperti kita ketahui bersama Sulawesi Tengah diperhadapkan dengan luasnya wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi 4 wilayah pengelolaan perikanan yakni (wpp 713 selat makassar, wpp 714 teluk tolo dan wpp 715 teluk tomini serta wpp 716 laut sulawesi) dengan karakteristik laut dan pesisir yang berbeda-beda. namun demikian, berkat kerja keras, dan kerjasama bersama pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan pesisir dan laut.

Berkaitan dengan hal tersebut, mewakili pemerintah provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lembaga-lembaga non pemerintah khususnya relawan orang dan alam (roa), **critical ecosystem fund, dan burung indonesia** atas perhatian dan dukungan serta kerja samanya sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut ini dapat diperoleh hasil yang optimal selama melaksanakan kinerja perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dengan baik.

### 3.3 Penandatanganan Nota Kesepahaman pengelolaan DPL dan Perlindungan KBA Perairan Balantak antara kelompok DPL dengan pemerintah kabupaten Banggai dan DKP Provinsi(belum terlaksana)

Tgl 31 Agustus 2019 dengan partisipasn sebanyak 20 orang diantaranya Laki-laki 15 Orang Laki-laki dan 5 Orang perempuan, Dua Kelompok Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, sepakat bekerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman konservasi Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan perlindungan wilayah Key Biodiversity Area Perairan Balantak Kabupaten Banggai dalam bingkai pembangunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K)Sulawesi Tengah.

Latar belakang kerjasama tersebut didasari wilayah Perairan Balantak memiliki jenis keragamanhayati yang cukup tinggi, terdapat diantaranya Penyu , Hiu, dan beberapa jenis terumbu karang, ikan

karang dan lamun dan menjadi lintasan ikan paus serta lumba-lumba.

Keragamanhayati yang tinggi itu tak lepas dari ancaman yang tinggi pula, praktik *overfishing* dan *destructive fishing* merupakan ancaman utama bagi kelangsungan keragamanhayati di KBA ini. Untuk mengurangi tingkat ancaman bagi keragamanhayati di KBA perairan Balantak, pada tahun 2017 hingga 2019 melalui dukungan pendanaan RIT CEPF Burung Indonesia, ROA telah memfasilitasi identifikasi, perumusan dan penetapan DPL di Kelurahan Talang Batu dan Desa Luok di Kecamatan Balantak.

Keberadaan dua kelompok DPL tersebut menjadi bagian penting dalam melakukan perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan. Namun demikian peran para pihak juga sangat dibutuhkan untuk secara bersama-sama sehingga ROA memandang perlu memfasilitasi para pihak untuk saling bekerjasama dan berkolaborasi dalam proses perlindungan maupun pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Peran para pihak itu kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara kelompok DPL Tanjung Saro Kelurahan Talang Batu dan Kelompok DPL Fajar Indah Desa Luok Kecamatan Balantak dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah,"Ungkap Subarkah.

Moh Edward O Yusuf S.Pi, M.Sc, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dibangun selama ini oleh masyarakat dalam membangun kelompok untuk melakukan perlindungan dan pemanfaatan serta pengelolaan termasuk mengawasi wilayah pesisir dan laut untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di wilayahnya masing-masing.

Ada keterkaitan dan keterhubungan antara visi misi Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah dimana dua kelompok ini memiliki program yang berkaitan dengan nilai-nilai konservasi dan kami pun memiliki visi pembangunan berkelanjutan dan misi meningkatkan upaya konservasi,bila dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana, laut akan menyediakan kedaulatan pangan, energi dan penyediaan lapangan kerja serta yang terpenting adalah kualitas lingkungan tetap terjaga khususnya ekosistem wilayah pesisir dan laut.



#### IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen Verifikasi
Penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang	(perburuan, perdagangan, DII)	Jumlah Ancaman turun dengan prosentasi tertentu di akhir program	(survei/Monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan Pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang mendapatkan peningkatan Pengelolaan	Dokumen verifikasi
KBA Perairan Balantak	Daerah Perlindungan Laut Tanjung Saro	40 hektar (Zona Inti 4 hektar dan zona rehabilitasi 10 hektar zona pengelolaan 26 hektar	Surat Keputusan Kelurahan Penetapan DPL Tanjung Saro
KBA Perairan Balantak	Daerah Perlindungan laut Fajar Indah		

3. Perlindungan Kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi

4. Penerima manfaat

- a. Karakter penerima manfaat (silahkan checklist pada tiap kolom yang relevan)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas										
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
								50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Komunitas Masyarakat Talang Batu	√	√								√	
Komunitas Masyarakat Luok	√	√					√				

- b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (laki-laki)	Jumlah Penerima Manfaat (perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan	461	518
Meningkatnya akses layanan publik (kesehatan, pendidikan dll)	379	112
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	379	112

Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan(sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Desiminasi capaian program	19	1
Sosialisasi program	19	11
Kap survei (baseline/endlines)	40	
Serial Kampanye	85	50
Survei ekologi dan ekonomi	15	1
Pelatihan Partisipatif Pemetaan DPL	15	1
Penyusunan Petan DPL dan Pemasangan tanda Batas DPL	14	1
Pengesahan Perdes pengelolaan DPL Desa Luok dan talang batu serta sinkronisasi pengelolaan DPL dengan RPJMdes	14	1
Serial FGD Kesepahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan DPL dan Perlindungan KBA secara partisipatif	30	12
Workshop penguatan kapasitas kelompok DPL dalam upaya konservasi keragaman dan peningkatan penghidupan secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir	10	5
Penyusunan rencana kelola DPL secara partisipatif	20	10
Workshop penyusunan regulasi dan integrasi program pembangunan tingkat desa/kelurahan dalam pengelolaan DPL dan rencana kelola DPL	28	2
Uji praktek rencana kelola dan monitoring DPL secara partisipatif	24	6
Konsultasi publik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/provinsi tentang rencana kelola DPL	15	
Serial workshop integrasi pengelolaan DPL ditingkat tapak dengan program dan kebijakan pemerintah kabupaten/provinsi	16	6
Penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan DPL dan perlindungan KBA perairan balantak antara kelompok DPL dengan pemerintah	15	5
<b>Total Penerima manfaat</b>	<b>379</b>	<b>112</b>

#### 5. Regulasi/Kebijakan Lokal

Nama Regulasi/kebijakan	Ruang Lingkup(nasional, lokal,desa)	Topik	Hasil yang diharapkan
-------------------------	-------------------------------------	-------	-----------------------

Peraturan kelurahan	Kelurahan Talang Batu	Pembentukan Kelompok Daerah Perlindungan Laut	Pemerintah Kelurahan Talang Batu mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Daerah Perlindungan Laut Tanjung Saro
Peraturan kelurahan	Kelurahan Talang Batu	Penetapan Daerah Perlindungan Laut	Pemerintah Kelurahan Talang Batu mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Daerah Perlindungan Laut
Surat Keputusan	Desa Luok	SK Kelompok Fajar Indah Desa Luok	Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Daerah Perlindungan Laut Fajar Indah
Surat Keputusan	Desa Luok	SK Penetapan DPL Fajar Indah	Mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Daerah Perlindungan Laut
Peraturan Desa	Desa Luok		Peraturan Desa

#### 6. Jaringan Kerja/Forum Multipihak

Jaringan atau kemitraan yang terbentuk sebagai hasil dari proyek yang dilaksanakan. Jaringan atau kemitraan ini berkaitan dengan capaian proyek contoh: Forum pengelolaan daerah tangkapan air yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan kerja bersama parapihak dalam pengelolaan daerah tangkapan air)

Nama Jaringan/kemitraan	Ruang Lingkup(nasional,lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
Jaringan Sahabat ROA – GM Pelita	Lokal	Menjadi Penggerak Konservasi wilayah pesisir dan laut di wilayah Banggai	2019
Jurnalis Konservasi	Lokal	Menjadi mitra dalam gerakan konservasi	2019

#### 7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam produktif yang mendapatkan peningkatan pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan Laut	4 Hektar	Peta DPL Tanjung Saro
Zona bentang alam produktif	Daerah Perlindungan laut	21 hektar	Peta DPL Fajar Indah

## V. PEMBELAJARAN

- Kegiatan atau strategi apa yang berhasil dengan baik, dan apa yang kurang berhasil ? mengapa demikian dan apa dampaknya ?

Dalam periode tengah proyek ini dalam bentuk kegiatan yang telah dijadwalkan beberapa bisa terlaksana dengan baik hanya saja terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Penanggungjawab dan pelaksana program terdampak bencana secara langsung pada 28 September 2018 akan tetapi sekalipun demikian lokus wilayah program tidak terkena dampak namun demikian sangat memengaruhi karena pada saat bulan September 2018 Pelaksana akan melakukan implementasi tertunda dan baru terkonsolidasi kembali 2 minggu setelah pasca bencana.

Dan secara internal melakukan konsolidasi perencanaan jadwal kembali dan implementasi program berjalan dengan melakukan persiapan yang dikondisikan dengan memulai melakukan kordinasi para pihak yang akan

menjadi kolaborator dalam implementasi program yang secara konkretnya dilaksanakan mulai Desember 2018.

2. Kondisi lain yang memengaruhi adalah pelaksanaan tahapan pesta demokrasi membatasi ruang gerak dalam melakukan kegiatan, masyarakat, pemerintah di level desa dan kabupaten serta provinsi sekalipun tidak terlibat akan tetapi bergerak dalam penyiapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan lancar dan aman.

Strategi dengan melibatkan para pihak untuk (kolaboratif) dan partisipatif yang akan diterapkan sesungguhnya telah dirancang dengan baik dan diharapkan berjalan dengan baik, akan tetapi beberapa faktor tersebut diatas menghambat implementasi pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan tertunda dan mesti melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan.

<b>Isu</b>	<b>Keberhasilan/kurang berhasil</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Dampak</b>	<b>Rekomendasi</b>
Hasil:				
a.Perubahan Pengetahuan	Berhasil membawa perubahan pengetahuan	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan	Pengetahuan masyarakat bertambah terkait isu-isu perlindungan kawasan	Perlu terus didukung melalui akses-akses terhadap informasi yang aktual terkait perlindungan kawasan konservasi mengingat perkembangan teknologi semakin baik
b.Perubahan Sikap	Berhasil membawa perubahan sikap	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan	Sikap masyarakat mendukung adanya langkah-langkah pelestarian dan	

			perlindungan kawasan	
c.Perubahan Perilaku	Berhasil membawa perubahan perilaku	Intervensi program melalui aktivitas kegiatan	Masyarakat membentuk Kelompok DPL dan menjadi aktor utama dalam pengelolaan DPL sekaligus Monitoring dan pemantauan	Perlu mendukung Kelompok DPL Tanjung Saro dan Kelompok Fajar Indah dari sisi peningkatan kapasitas anggota kelompok, kapasitas lembaga dan peralatan dalam mendukung pemantauan dan penyelamatan wilayah DPL dan Perairan Balantak
Proses:				
Perencanaan	Berhasil	Penyusunan perencanaanya yang baik	Aktivitas kegiatan berjalan	
Pelaksanaan	Berhasil	Penyusunan waktu yang disesuaikan dengan kemampuan baik finansial dan sumberdaya manusia	Aktivitas kegiatan berjalan	

## **VI. STATUS KEUANGAN**

- a. Pemasukan : Rp.306.277.000
- b. Pengeluaran : Rp. 325.481.000
- c. Saldo : Rp.(19.177.023)

Terkait status keuangan dari hasil laporan pengelola keuangan menyebutkan bahwa pemasukan telah sesuai pencatatan dimana pemasukan berdasarkan transaksi yang dikeluarkan oleh Burung Indonesia kepada lembaga pengelola program yang menjadi pemasukan bagi lembaga pengelola.

Lembaga pengelola secara bertahap menerima pemasukan dengan proses termin pertama dan termin kedua yang diproses setelah semua laporan tengah program diterima oleh pihak Burung Indonesia yang secara keseluruhan pencatatan pemasukan oleh keuangan telah mencapai Rp.306.277.000

Terkait pengeluaran yang dilakukan tercatat sebesar Rp.325.481.000 sehingga terjadi selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Selisih pengeluaran tersebut ditanggung oleh lembaga pengelola program dan akan diberikan oleh Burung Indonesia setelah semua pelaporan baik laporan akhir program maupun laporan keuangan dinyatakan diterima oleh Burung Indonesia yang dikirimkan dalam bentuk transfer termin ketiga atau terakhir.